

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah tindakan yang saling berhubungan dan menggabungkan berbagai komponen yang saling berhubungan erat satu sama lain (Sutrisno, 2016: 29). Selain itu juga Menurut Djumali dkk. (2014: Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan individu agar mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan saat ini maupun di masa yang akan datang.

Mendapatkan pendidikan sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir dasar dan tingkat tinggi. Peserta didik harus memiliki akses yang lebih adil ke pendidikan berkualitas tinggi, pelatihan teknis dan kejuruan, serta nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi kepada masyarakat di semua tingkat pendidikan dan pembangunan. Dengan demikian, diperlukan kerangka kerja dan program kerja operasional yang metodis, demi kepentingan umum, dan cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan pergeseran sosial, ekonomi, dan budaya yang berdampak pada pendidikan, bersama dengan seperangkat kebijakan yang menjunjung tinggi hak yang sama untuk menerima pendidikan.

Sejumlah masalah multifaset, seperti kurangnya pemahaman tentang nilai pendidikan, kurangnya keterlibatan masyarakat, akses yang tidak merata di batas-batas antara kelas sosial, dan masalah Fasilitas, Tantangan, Uang, Sumber Daya Manusia, dan Prasarana lain yang sedang berlangsung, menghambat pengembangan kuantitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Contoh korupsi dalam anggaran pendidikan bahkan memperburuk keadaan. Sementara itu, adalah fakta bahwa banyak anak usia sekolah dipekerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Banyak dari mereka kemudian berubah berubah menjadi pemain jalanan, panhandler, penjual aksesoris untuk penggerak empat roda, penjual makanan dan minuman, dan sebagainya. Kondisi ini memiliki hubungan terbalik yang kuat dengan obsesi anak-anak kelas menengah ke atas untuk menemukan sekolah impian mereka, bergengsi, dan mahal.

Isu-isu yang mencemari bidang pendidikan dengan cara ini harus diselesaikan secara holistik dan kolaboratif. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mencapai pendidikan untuk semua sekaligus menurunkan tingkat putus sekolah dan mempromosikan kemajuan dalam jumlah dan kualitas sekolah.

Program Indonesia Smart merupakan salah satu inisiatif pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah dalam upaya menurunkan angka putus sekolah. Pada dasarnya telah mengalami banyak perubahan dari inisiatif yang sebelumnya diterapkan dan ditingkatkan seperti Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Perlindungan Sosial, Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tiga Kementerian: Departemen Kesejahteraan Sosial, Departemen Pendidikan dan Urusan Agama, dan Departemen Agama diharapkan dapat berkolaborasi dalam program Indonesia Cerdas secara bersamaan, menjadikannya inisiatif unggulan.

Selain itu, dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 mewajibkan anak dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk menerbitkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai bukti identitas agar dapat menerima manfaat PIP atau jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula.

Terutama ketika kita ingat bahwa pendidikan dapat digunakan sebagai strategi investasi jangka panjang yang mulia dan sangat berguna, terutama bagi generasi muda. Ini pada akhirnya akan menentukan apakah wilayah yang disebutkan di atas terus tumbuh atau tidak. *Pertama* dan terpenting, pendidikan harus mampu mengatasi berbagai masalah, terutama bagi generasi muda, yang dianggap sebagai titik balik dalam masyarakat. *Kedua*, setiap anak

memiliki hak atas pendidikan, tanpa memandang jenis kelamin. Meskipun ada anak-anak dari kelompok minoritas di antara mereka, di komunitas yang terisolasi bahkan ada anak yatim piatu. *Ketiga*, pendidikan idealnya perlu didasarkan pada perolehan keterampilan dan kecakapan teknologi selain meningkatkan wawasan. *Keempat*, hilangkan ketidaksetaraan sosial berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, tempat, kedudukan sosial ekonomi, dan sebagainya. Kelima, meningkatkan kualitas dan standar layanan pendidikan. dan jumlah siswa yang dihasilkan, Terutama ketika kita ingat bahwa pendidikan dapat digunakan sebagai strategi investasi jangka panjang yang mulia dan sangat berguna, terutama bagi generasi muda Ini pada akhirnya akan menentukan apakah wilayah yang disebutkan di atas terus tumbuh atau tidak. Yang *keenam* difokuskan untuk memaksimalkan potensi siswa.

Program Indonesia Pintar (PIP) sangat penting bagi strategi 3 November 2014, diperkenalkan Presiden Joko Widodo, yang menjabat di Indonesia pada tahun 2015. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag) berkolaborasi mewujudkan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Cerdas (PIP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Pendidikan yang bersangkutan. Umum, Administrasi Perda/Kota, dan satuan sekolah. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berfungsi sebagai penanda dan pengenalan bagi mereka yang mendapatkan dukungan pendidikan di bawah Program Indonesia Cerdas (PIP) merupakan sarana pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) mengacu pada Peraturan Program Indonesia Pintar Nomor 12 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KIP atau Kartu Indonesia Pintar adalah sebuah program pemberian bantuan tunai pendidikan dari pemerintah kepada anak usia sekolah (6-12 tahun) dari keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini diajukan mewujudkan program wajib belajar 9 tahun dan pengajaran tambahan yang meluas atau disebut dengan wajib sekolah 12 tahun. (Kemendikbud, 2016; Fammaldo dan Hakim, 2018). Ringkasnya KIP merupakan program pemerintah Ini dimulai untuk mengatasi masalah pendidikan yang disebabkan oleh prevalensi anak-anak usia

sekolah yang terpaksa putus sekolah karena kesulitan keuangan pendidikan (Rohaeni & Saryono, 2018; Gutama, 2021).

Program Indonesia Pintar, melalui Indonesia Pintar Kartu (KIP), merupakan lingkup Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak didirikan pada tahun 2014. Kartu Indonesia Pintar (KIP) disediakan sebagai sarana verifikasi dan jaminan bahwa anak akan menerima manfaat dari Program Indonesia Pintar jika anak tersebut telah mendaftar atau belum terdaftar di lembaga pendidikan formal (sekolah atau madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (seperti Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus, dan organisasi pendidikan nonformal lainnya di bawah naungan Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Agama (Asiz, 2019).

Menurut informasi yang terdapat di laman www.pip.kemendikbud.go.id, sebanyak 1.367.559 siswa SMA dan 1.829.167 siswa SMK di seluruh negeri akan mendapatkan bantuan PIP mulai 15 Januari 2022, dengan dana yang dialokasikan masing-masing sebesar Rp. 1.174.988.500.000 dan Rp. 1.529.167.000.000. Pendanaan bantuan KIP sebesar Rp 1.000.000 per orang per tahun untuk jenjang SMA, SMK, Paket C, dan mata kuliah. (www.tempo.com, 2022).

Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses layanan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bertujuan memberikan dukungan pendidikan hingga lulus. Salah satu institusi pendidikan yang memberikan KIP kepada pelajar adalah SMA Negeri Bikomi Utara Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). SMA Negeri Bikomi Utara menjadi salah satu sekolah menengah atas di mana siswa-siswinya tergolong kedalam keluarga kurang mampu sehingga banyak yang menerima

bantuan KIP untuk memenuhi kebutuhan akademik dan non akademiknya di sekolah. Penerima KIP pada SMA Negeri Bikomi Utara sebanyak 103 mereka yang memiliki informasi berikut.

Tabel.1.1 Penerima KIP tahun ajaran 2020/2021 SMA Negeri Bikomi Utara.

No	Kategori	Jumlah siswa	Dana bantuan KIP yang Diterima Siswa per Semester	Dana Bantuan yang di terima siswa per tahun ajaran.
1	Laki-laki	42	Rp 500.000	Rp 1.000.000
2	Perempuan	61	Rp 500.000	Rp 1.000.000

Sumber: SMA Negeri Bikomi Utara(2023)

Sebanyak 103 siswa dari keluarga miskin Kartu Indonesia Pintar memberikan dukungan kepada sekolah ini (KIP) pada tahun ajaran 2020/21. Setiap mahasiswa mendapat bantuan sebesar Rp500.000,00 setiap semester, dengan hitungan dua kuitansi sepanjang tahun, yaitu semester ganjil dan genap, sehingga jumlah yang terkumpul adalah Rp1 juta untuk setiap mahasiswa. Oleh karena itu, sekolah menyalurkan Rp 51.500.000 setiap semester. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah tambahan, sepatu, ransel, dan alat tulis. Kartu Indonesia Pintar (KIP) didukung oleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah Pusat kepada para siswa tersebut. Sekolah didorong untuk menerapkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berperan secara operasional melalui keberadaannya.

Pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri Bikomi Utara terdapat kendala yang berdasarkan observasi dan wawancara 28 September 2022 diketahui bahwa proses

transfer ke rekening siswa menyebabkan siswa tidak menggunakan uang sesuai peruntukan tetapi menggunakannya untuk hal lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan.

Berdasarkan dari persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan judul **“Evaluasi Pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana Pemanfaatan dana Kartu Indonesia Pintar di SMA Negeri Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar. di SMA Negeri Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah keuntungan dari penelitian ini:

1. Untuk peneliti

Studi ini akan membantu masyarakat lebih memahami bagaimana dana bantuan Kartu Indonesia Pintar digunakan di SMA Negeri Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara

2. Bagi sekolah

Meningkatkan efektifitas pelaksanaan Kartu Indonesia pintar di SMA Negeri Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara

3. Bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang,

penelitian ini diantisipasi memberikan kontribusi tambahan.